

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Angel, Saz-Carranza and Sonia M. Ospina, 2016. "The Behavioral Dimension of Governing Interorganizational Goal-Directed Networks—Managing the Unity-Diversity Tension". *Journal of Public Administration Research and Theory* Volume 21, Number 2 , April 2016.
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jopart/impactfactor.html. (22 Maret 2015)
- Abidin, 2006, *Kebijakan Publik*, Jakarta; Suara Bebas
- Agustino, Leo. 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta,
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Anderson, James E., 1975, *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Baedhowi. 2004. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Brinkerhoff, Derick W– Benjamin L. Crosby, 2002, *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.

Chris I Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Departement of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State-Nigeria, April 2012, *Public Policy and Challenges of Policy Evaluation in Third World*, “British Journal of Humaniora and Social Science”

Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.

Dwiyanto, Agus ,2002, *Reformasi Birokrasi Di Indonesia* , Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.

Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.

Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America.

Ferlie, Ewan; McGivern, Gerry , 2017. “Bringing Anglo-Governmentality into Public Management Scholarship: The Case of Evidence-based Medicine in UK Health Care”. *Journal of Public Administration Research and Theory* , Volume 24 (1) – Jan 1, 2017.

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jopart/impactfactor.html. (22 Maret 2015)

- Goggin, Malcolm L *et al.* 1990. *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho D Riant, 2011, *Public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Manajemen Dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Elex Media Computindo.
- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.

- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan-Peraturan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

3. Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik.
4. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini





WALIKOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 900/ /K/2016

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI
LINGKUNGAN**

**DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN ANGGARAN 2016**

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai perlu ditetapkan sekolah – sekolah yang menerima dana tersebut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2016 dan sasaran kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2486);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2016;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);

24. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
27. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014;

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
34. Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
36. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Anggaran 2016.
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
39. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
40. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;
41. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Peraturan WaliKota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA** : Penetapan sekolah penerima Dana Alokasi Khusus dimaksud pada diktum kesatu terhitung mulai Mei 2016
- KEEMPAT** : Keputusan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada tanggal, Mei 2016

**WALIKOTA
TANJUNGBALAI**

M. SYAHRIAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai;
4. Penyelenggara PAUD Penerima DAK dan DAU Pendamping TA. 2016 di Kota Tanjungbalai.

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 900/ / K / 2016

TANGGAL :

TENTANG : Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)
Program Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016.

NO	NPSN	NAMA PENGELOLA	JUMLAH ANAK	JUMLAH DANA (Rp)
1	69793088	SRI REJEKI, S.Pd.I	19	11.400.000
2	69917190	ZULKHAIRAH MARPAUNG, S.Ag	20	12.000.000
3	69793118	RATNA KARTINI, SE	36	21.600.000
4	69793133	R. SYOFIA DYAS, S.Pd	35	21.000.000
5	69793141	ASMAH NINA SIREGAR	21	12.600.000
6	69793070	SANIAH	31	18.600.000
7	69793103	YUHANI, A.Ma.Pd	20	12.000.000
8	69793053	R. HASLELI DYAZ, S.Pd	27	16.200.000
9	69793065	BASARIA SIANIPAR, S.Th	53	31.800.000
10	69793087	BIMAS SINULINGGA, S.Th	22	13.200.000
11	69859673	KARMUDDIN SIHOTANG	10	6.000.000
12	69793044	Hj. NURMADNAH, A.Ma	20	12.000.000
13	69793064	Dra. NURASIAH MARPAUNG, S.Pd.I	15	9.000.000
14	69793125	Hj. JURMIAH	22	13.200.000
15	69793049	MARIA SANTIFA, SE	20	12.000.000
16	69793130	SAFRIDA MANURUNG, S.Pd.I	20	12.000.000
17	69793128	MARIATI	24	14.400.000
18	69793100	ELISA	14	8.400.000
19	69793131	Dra. NURAIDAH	22	13.200.000
20	69793038	SRI WAHYUNI GINTING	18	10.800.000
21	69793042	NURHAYATI SIMANGUNSONG, S.Pd	20	12.000.000
22	69793072	HALMIAH, S.Pd.I	15	9.000.000

23	69793054	ABDI NUSANTARA, S.Pd	20	12.000.000
24	69793078	SARMILA SITORUS, S.Pd	23	13.800.000
25	69793121	Dra. LILIS SURYANI	36	21.600.000
26	69793060	FARIDA ARYANI SITORUS PANE	28	16.800.000
27	69793086	NURASYIAH SARAGIH, S.Pd.I	22	13.200.000
28	69793069	SOFRIDAR, S.Pd	22	13.200.000
29	69859676	YUSNAIDA, S.Pd	16	9.600.000
30	69859672	R. NINA CHRISTINA	18	10.800.000
31	69793080	JUHAINAH	27	16.200.000
32	69793117	EV. DEVRIES C. SIHOMBING, S.Th	18	10.800.000
33	69793115	Hj. FATIMAH SYAM SINAMBELA, S.Ag	20	12.000.000
34	69858972	PITTA MAULI BERUTU, S.Th	16	9.600.000
35	69859674	NILAWATY SIREGAR, S.Pd	50	30.000.000
36	69793082	FLORA R.A GUSTARINI, S.Si	46	27.600.000
37	69933843	ASMARIANI MARPAUNG	20	12.000.000
38	69793109	VERA AFRIANA BUTAR-BUTAR	21	12.600.000
39	69858964	Sr. ODILIA SIMBOLON FCJM	21	12.600.000
40	69793068	IRAWATI HASIBUAN, A.Ma.Pd	19	11.400.000
41	69793036	RUSNEL, S.Pd.I	22	13.200.000
42	69793099	SITI AISYAH, A.Md	46	27.600.000
43	69793142	NK. SUMIATI	23	13.800.000
44	69793095	JUMITA	42	25.200.000
45	69793104	HASRIANTI, A.Ma	20	12.000.000
46	69793043	MAYA SARI MARGOLANG	26	15.600.000
47	69858967	WAHYU WANA, A.MK	16	9.600.000
48	69859675	NURLEN MANURUNG	23	13.800.000
49	69914425	DUMAYANTI	20	12.000.000
50	69914226	NURJANNAH	15	9.000.000

51	69793138	Hj. SITI NAHDOH, S.Ag	18	10.800.000
52	69793046	RABIAH	21	12.600.000
53	69793137	MAISYAROH	36	21.600.000
54	69793083	JURAIDAH, BA	21	12.600.000
55	69793119	FATHIAH, S.Ag	33	19.800.000
56	69793120	RISTINA MANGUNSONG	20	12.000.000
57	69793101	NURLIANA DAMANIK	21	12.600.000
58	69914252	RODIAH, A.Ma	15	9.000.000
59	69793081	MAWADDAH	30	18.000.000
60	69793126	ARLINA	18	10.800.000
61	69793063	DAHNIAR	22	13.200.000
62	69793111	KHAIRUN NISWAH, S.Psi	11	6.600.000
63	69914255	RATIH KESUMA RAHMADHANI	34	20.400.000
64	69914427	HERNILAWATI	23	13.800.000
65	69793139	MARHAMAH, S.Pd.I	41	24.600.000
66	69793105	KHORIAH, S.Pd	20	12.000.000
67	69793073	HAMDAN CHANIAGO	28	16.800.000
68	69793037	HALIMAH	30	18.000.000
69	69793113	SUSI ARYANI DALIMUNTHE	23	13.800.000
70	69793040	LISMAWATI NASUTION	60	36.000.000
71	69793136	DAMAYANTI	44	26.400.000
72	69793058	PARIDAH	34	20.400.000
73	69793123	FAUZIAH, SE	31	18.600.000
74	69793050	YULI SARI NASUTION	42	25.200.000
75	69793074	MARIANNA PASARIBU	24	14.400.000
76	69793116	NUR YETTI, SE	40	24.000.000
77	69858968	EPI NADRI NASUTION	27	16.200.000
78	69914392	HARNITA, S.Pd	35	21.000.000
79	69858969	SUPIYAH	24	14.400.000
80	69859678	AZHARUDDIN PANJAITAN	25	15.000.000
81	69858970	SYARIFAH FITRIANI	36	21.600.000
82	69864811	ADE IRMAYANTI, A.MK	22	13.200.000

83	69859667	MUZDALIFAH TAMBUNAN	20	12.000.000
84	69914235	SUPRIANTO	24	14.400.000
85	69793079	Hj. FATMA SYAHNAINI, A.MK	60	36.000.000
86	69793066	MIAN BERAMPU	60	36.000.000
87	69793062	SYAMSURIATY, S.Pd	60	36.000.000
88	69859670	NILAWATY SIREGAR, S.Pd	60	36.000.000
89	10261422	Sr. LAMBERTA SIBORO FCJM	60	36.000.000
90	69793094	NURTETTI SIHOTANG, S.Pd	60	36.000.000
91	69793096	Ir. LISBET SIAGIAN	26	15.600.000
92	69793084	ANGGIA TANTRI, S.Pd	52	31.200.000
93	10261415	PENTY FATIMAH PANJAITAN, S.Pd	58	34.800.000
94	69858963	SRI ATMINI, S.Pd	31	18.600.000
95	69793089	FAUZIAH	38	22.800.000
96	69793097	KHORIAH	32	19.200.000
97	102616607	ROSNANI	33	19.800.000
98	69859666	Dra. NURASIAH	20	12.000.000
99	69859669	SUMI HAKIM POHAN, S.Ag	37	22.200.000
100	69859668	RABIAH	60	36.000.000
				1.740.000.000